
PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA BERBASIS APLIKASI PAHARI DI KABUPATEN PULANG PISAU

IMPROVING THE PERFORMANCE OF VILLAGE GOVERNMENT APPARATUS BASED ON THE PAHARI APPLICATION IN PULANG PISAU DISTRICT

MUHAMMAD IRVAN YAZID
AZHAR PASARIBU¹

*¹ Universitas Muhammadiyah Palangka
Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah,
Indonesia

*email :

irvanyazid10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pelayanan publik sebelum dan sesudah adanya pelayanan berbasis Aplikasi. Hadirnya Aplikasi PAHARI dimaksudkan agar kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan administrasi yang terintegrasi, terpadu, terstandarisasi dan menyeluruh dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Dinas PMDes sebagai penggagas aplikasi, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai pengembang aplikasi dan Aparatur Pemerintah Desa sebagai objek penelitian selaku yang pemberi layanan kepada masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi PAHARI dapat meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan administratif dengan maksimal dan dapat teratasi dengan pengembangan Aplikasi PAHARI yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera.

Kata Kunci:

Kinerja
Pelayanan Publik
Aparatur Pemerintah Desa
Aplikasi PAHARI

Keywords:

Performance
Public service
Village Government Apparatus
PAHARI application

Abstract

This research aims to see the picture of public services before and after the existence of application-based services. The presence of the PAHARI Application is intended so that the performance of Village Government Apparatus can provide integrated, integrated, standardized and comprehensive administrative services in realizing excellent service. The method in this research is descriptive qualitative with research subjects namely the PMDes Service as the initiator of the application, the Government Section of the Regional Secretariat as the developer of the application and the Village Government Apparatus as the research object as the provider of services to the community in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. The results of this research are that the PAHARI Application can improve the performance of Village Government Apparatus in providing maximum administrative services and can be resolved by developing the PAHARI Application which is innovative, advanced, just and prosperous.

PENDAHULUAN

Surat-menyurat merupakan salah satu jenis pelayanan penting yang ada di setiap Desa. Terkait dengan aspek pelayanan kepada masyarakat desa, perlu dilakukan peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan di desa, baik pelayanan yang bersifat internal maupun eksternal, baik fisik maupun administratif. Terdapat beberapa jenis surat yang

dilayani oleh desa seperti surat pernyataan, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan belum menikah, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan serbaguna, surat keterangan domisili perusahaan, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan usaha dan beberapa surat-surat lainnya.

Kelemahan yang dialami oleh sebagian besar kantor instansi pemerintahan lingkup desa yaitu

kurangnya dalam mengolah pembuatan surat-menysurat yang baik. Perlu adanya suatu peningkatan yang dapat membangun sistem terpadu administrasi data desa yang ditunjukkan bagi aparat pemerintahan desa kepada pelayanan masyarakat, agar dapat mengelola data administrasi desa dalam sebuah sistem informasi dan pelaporan elektronik yang terpadu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, atau kelompok orang, atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik harus didukung oleh kinerja aparatur yang baik.

Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kinerja aparatur desa harus sesuai dengan pedomannya yaitu konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat untuk mengelola dan menangani urusan desa. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka diperlukan dalam memperkuat pemerintahan desa, supaya semakin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Dalam rangka peran pemerintah daerah maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat di mana berafiliasi langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Melalui pelayanan publik yang baik maka akan berujung kepada kualitas dari kinerja aparatur desa tersebut, demi tercapainya prinsip-prinsip dari *good governance*.

Berdasarkan pantauan secara langsung di lapangan yang terjadi di desa dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau, terdapat beberapa hal yang dirasa masih perlu menjadi perhatian khusus terkait kapasitas aparatur desa dalam hal memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Permasalahan yang menjadi pokok utama yaitu masih sulitnya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada publik. Proses pelayanan yang lambat merupakan salah satunya. Hal ini berhubungan dengan produktivitas kinerja yang lemah dikarenakan kualitas sumber daya manusia kurang cepat tanggap dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaannya. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang

diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Ketidakjelasan prosedur dan ketidaksediaan pedoman surat yang baku, membuat proses administrasi menjadi berbelit-belit sehingga pengurusan menjadi sangat lama dan memakan banyak waktu. Sehingga permintaan akan kebutuhan surat-menyerut dari masyarakat membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Hal ini berkaitan dengan masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik. Jika hal ini dilakukan secara baik, maka masyarakat akan dapat memahami dan merasakan peran dan fungsi birokrasi yang sesungguhnya pada saat mendapatkan pelayanan. Di samping itu, masyarakat yang memahami dengan baik mengenai peran dan fungsi birokrasi akan menjadi dukungan dalam melakukan perubahan secara efisien. Namun bisa menjadi sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak mengalami perubahan yang akhirnya menjadi kelemahan dan bahkan menjadi penghambat dalam melakukan peningkatan.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu pelayanan administrasi masih menggunakan sistem manual dan tradisional. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketidaklengkapan dan ketidakakuratan dalam pencatatan administratif surat-menyerut. Pencatatan administratif seharusnya digunakan untuk menggali potensi wilayah di desa. Oleh karena itu aplikasi surat-menyerut secara komputerisasi yang sudah terapkan akan memudahkan kantor instansi pemerintah yakni kantor desa dalam pembuatan surat lebih cepat, tanggap, andal dan akurat, sesuai data yang dimiliki setiap penduduk yang tinggal di dalamnya. Kecenderungan lemahnya kompetensi terkait pada penggunaan teknologi informasi seperti *e-government* yang merupakan salah satu tantangan dan kebutuhan. Apabila ditambah dengan minimnya fasilitas *hardware*

dan *software* teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih di lembaga-lembaga birokrasi terutama di desa, hal ini berakibat pada pelaksanaan sistem pelayanan publik yang buruk dan tertinggal. Secara tidak langsung akan menjadi tidak baik dalam mewujudkan pengelolaan administrasi di desa yang transparan dan bertanggung jawab.

Tidak standarnya format administrasi yang dilayani menjadi permasalahan yang selanjutnya. Dalam pembuatan surat yang tidak terintegrasi memungkinkan adanya perbedaan format surat yang dibuat pada setiap desa. Hal ini tentunya bisa berbahaya, karena keabsahan suatu dokumen resmi sangat berkaitan dengan format surat yang sudah ditetapkan. Dan yang perlu menjadi perhatian lebih yaitu masih kurang optimalnya dalam memberikan informasi terkait dengan profil desa dan minimnya wadah bagi desa untuk mengekspos potensi yang ada di desa. Sehingga permasalahan ini akan berdampak kepada rendahnya pemberdayaan dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama di daerah perdesaan. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikana pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Hal tersebut menjadi permasalahan yang serius ketika Aparatur Pemerintah Desa lemah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PAHARI merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi yang

terintegritas, terpadu, terstandarisasi dan menyeluruh dalam mewujudkan pelayanan yang prima. PAHARI yang merupakan singkatan dari “Pelayanan Administrasi Handep Papakat Mandiri” yang diharapkan mampu membantu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi demi mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif.

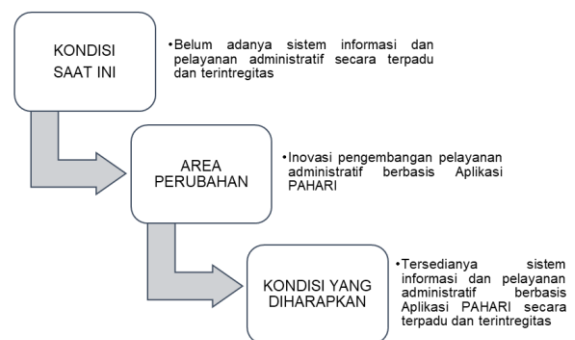


Gambar 1. Logo Aplikasi PAHARI

Aplikasi ini memuat berbagai surat-menyurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memuat database kependudukan dalam ketersediaan data-data yang lebih lengkap dan akurat. Di dalam aplikasi ini berisikan format baku dari setiap surat, sehingga sangat memudahkan Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan berupa permintaan surat-menyurat yang diminta oleh masyarakat. Hal tersebut akan memudahkan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dilakukan secara komputerisasi digital. Berdampak juga kepada masyarakat sebagai yang dilayani, berbagai urusan akan menjadi lebih simpel, cepat dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, dari data yang tersimpan pada aplikasi PAHARI akan terupdate secara otomatis. Contohnya seperti data umur, status, kematian, kelahiran, surat yang diminta, dan keterangan lainnya.

Dalam Aplikasi PAHARI, bukan hanya memuat format baku surat-menyurat dan database kependudukan. Namun juga memiliki fitur lain demi meningkatkan kinerja dari aparatur desa. Berdasarkan

kondisi eksisting yang terjadi, maka area dan fokus proyek perubahan ini meliputi penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan administrasi pemerintahan di Desa. Maka dalam proyek perubahan ini saya sebagai penulis akan mengangkat upaya atau strategi dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Pulang Pisau secara bertahap yang dilakukan di 95 Desa dan 4 Kelurahan serta 8 kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini mendorong penulis untuk menjadikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai objek penelitian dalam mewujudkan prinsip good governance dengan baik melalui Administrasi Publik.



Gambar 2. Area Perubahan

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2023 sampai April 2024 di Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Desa, Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan *stakeholder*. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi kuisioner atau panduan wawancara, dokumen, alat tulis, dan alat dokumentasi. Adapun alur penelitian ini adalah melakukan observasi lapangan, penentuan masyarakat yang di teliti, kemudian melakukan

wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi terstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik rekaman dalam pengumpulan data.

Tabel 1. Sampel Responden

No	Sample Responden	Jumlah
1	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Pulang Pisau	1
2	Kepala Dinas PMDes Pulang Pisau	1
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pulang Pisau	1
4	Camat Kahayan Hilir	1
5	Kepala sub bagian kerjasama dan Otonomi Daerah	1
6	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	1
7	Desa Mintin	7
8	Desa Gohong	7
9	Desa Mantaren II	7
10	Desa Anjir Pulang Pisau	7
11	Desa Kanamit Barat	7
Total		41

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan sebelum menggunakan Aplikasi PAHARI.

Sebelum hadirnya aplikasi PAHARI, terdapat banyak permasalahan terkait pelayanan administrasi Publik. Contoh dari permasalahan yang di dapat dari hasil wawancara bersama pihak Aparatur Pemerintah Desa dan pihak stakeholder yaitu:

1. Proses pelayanan lambat atau waktu pelayanan relatif lama;
2. Pelayanan administrasi masih menggunakan sistem manual;
3. Format administrasi tidak standar;
4. Pencatatan administratif yang kurang baik atau tidak rapi;
5. Ketergantungan terhadap kemampuan tenaga administrasi tertentu.

Permasalahan yang menjadi pokok utamanya adalah masih sulitnya aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi yang maksimal kepada masyarakat. Proses pelayanan yang lambat merupakan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam penyajian surat-menyurat kepada masyarakat, Aparatur Pemerintah Desa memerlukan

waktu yang sangat lama kira-kira sekitar 1 jam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan cara penyanyiaan yang masih manual, tidak cepat, tidak tepat, dan tidak akurat.

Hal ini berkaitan juga dengan persoalan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Produktivitas kinerja yang lemah dikarenakan kualitas sumber daya manusia kurang cepat tanggap dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaannya. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Ketidakjelasan prosedur dan ketidaksediaan pedoman surat yang baku, membuat proses administrasi menjadi berbelit-belit sehingga pengurusan menjadi sangat lama dan memakan banyak waktu. Sehingga permintaan akan kebutuhan surat-menyurat dari masyarakat membutuhkan waktu yang lama dan juga rumit.

Melihat situasi dan kondisi modern saat ini maka tumbuh suatu upaya dalam mencari suatu solusi agar administrasi pemerintahan desa bisa dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, cerdas, efisien dan efektif, dengan surat format baku kemudian tidak bergantung kepada aparatur lain. sehingga salah satu solusi yang didapatkan adalah membangun aplikasi-aplikasi yang sebut dengan aplikasi PAHARI (Pelayanan Administrasi Handap Hapakat Mandiri).



Gambar 3. Fitur Aplikasi PAHARI

Aplikasi PAHARI sudah dirancang sedemikian rupa sehingga fitur-fitur di dalamnya akan memudahkan pihak aparatur dalam memberikan pelayanan administratif yang maksimal kepada masyarakat. Fitur yang ada di dalam aplikasi ini memuat profil desa, data desa, surat-menyurat, surat tanah, arsip surat, APBDes dan lain-lain. Surat-menyurat di dalamnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memuat database kependudukan dalam ketersediaan data-data yang lebih lengkap dan akurat. Dalam aplikasi ini berisikan format baku dari setiap surat, sehingga sangat memudahkan aparatur pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan berupa permintaan surat yang diminta oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi memudahkan aparatur dalam memberikan pelayanan publik karena dilakukan secara digital. Berdampak juga kepada masyarakat sebagai yang dilayani, berbagai urusan akan menjadi lebih simpel, cepat dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, dari data yang tersimpan pada aplikasi PAHARI akan terupdate secara otomatis. Contohnya seperti data umur, status, surat yang diminta, data kematian, data kelahiran dan keterangan lainnya.

Ketika masyarakat ingin meminta surat pengantar kartu kerluarga, pihak aparatur hanya tinggal membuka aplikasi dan mencari fitur surat baku yang diinginkan. Dikarenakan dalam aplikasi PAHARI memuat database kependudukan, masyarakat tidak perlu lagi mengisi formulir karena sudah terdata *by system* sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pengurusan surat-menyurat. Hal ini akan menjadi gambaran solusi dari permasalahan yang ada di desa dan sudah dilaksanakan oleh hampir seluruh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga dengan kehadiran Aplikasi PAHARI sangat dirasakan kemanfaatannya oleh Pemerintah Desa demi membantu pekerjaan aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada

masyarakat. Dengan adanya inovasi ini maka akan merumuskan langkah-langkah dalam mewujudkan *good and clean governance* bersama aplikasi PAHARI sejalan dengan visi misi Bupati Pulang Pisau yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten pulang pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera.



Gambar 4. Wawancara bersama Kepala BPMDes

B. Setelah Aparatur Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi PAHARI.

1. Proses pelayanan menjadi lebih cepat.

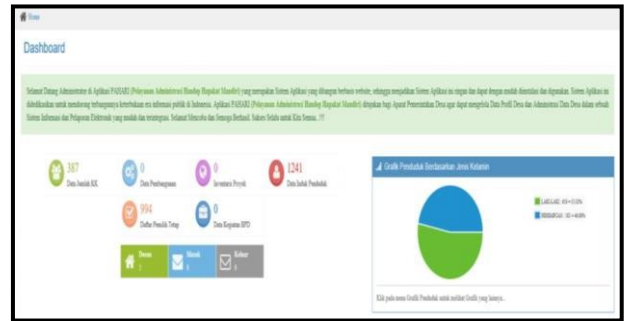
Dalam wawancara di lapangan menyatakan bahwa aplikasi PAHARI sangat membantu dalam bidang administrasi seperti surat-menyurat, karena format suratnya telah tersediakan secara terstruktur pada aplikasi tersebut. Sebelum menggunakan Aplikasi PAHARI, proses unit pelayanan kira-kira memakan waktu 1 jam. Namun dengan adanya Aplikasi ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat yaitu hanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Sehingga dengan proses pelayanan yang cepat akan menghasilkan pelayanan yang prima.

Hal ini sejalan dengan landasan teori menurut Ismail (dalam buku Menuju Pelayanan Prima, 2010:69), yang menyatakan bahwa pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian yang dapat dilakukan melalui penyiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan Sedarmayanti

(2009:249) menyatakan pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal sesuai dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, ramah). Tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan kepuasan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, mutu pelayanan publik adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan dari praktik pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik.

2. Pelayanan administrasi yang berbasis sistem aplikasi.

Pemerintah memiliki tugas utama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan, pemerintah perlu memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah dengan menghadirkan aplikasi pelayanan publik yang mudah dan praktis yang dapat diaplikasikan oleh pihak pemberi layanan di desa. Pelayanan administrasi hampir di seluruh pemerintahan desa Di Kabupaten Pulang Pisau telah menggunakan sisten komputerisasi berbasis Aplikasi Pelayanan yang bernama Aplikasi PAHARI. PAHARI merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi yang terintegritas, terpadu, terstandarisasi dan menyeluruh dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Aplikasi PAHARI mampu membantu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dalam mewujudkan pelayanan efisien dan efektif kepada masyarakat. Dan hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sudah menggunakan aplikasi PAHARI dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal dan terintegrasi.



Gambar 5. Dashboard

3. Format administrasi yang standar

Adanya pembuatan surat yang telah terintegrasikan memungkinkan adanya kesamaan format surat yang dibuat. Dengan adanya kemampuan sumber daya manusia pada Aparatur Pemerintah Desa dalam mengoperasikan komputer dibantu dengan teknologi aplikasi yang menyediakan surat baku akan meningkatkan kinerja baik dari sisi pelayanan dan skill. Aplikasi PAHARI telah menyediakan fitur surat baku untuk segala macam jenis surat yang diminta oleh masyarakat. Terdapat beberapa jenis surat yang dilayani oleh desa seperti surat pernyataan, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan belum menikah, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan serbaguna, surat keterangan domisili perusahaan, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan usaha dan beberapa surat-surat lainnya. Pihak pemberi layanan akan sangat terbantu dengan ketersediaan berbagai jenis surat di dalam aplikasi.

4. Pencatatan administrasi menjadi lebih baik dan rapi.

Sistem administrasi secara aplikasi dapat membuat pencatatan dokumen dan lainnya (Biaya, data dll) dilakukan secara otomatis dalam aplikasi. Hal ini dapat berpeluang terhadap kelengkapan dan keakuratan pencatatan yang dilakukan. Secara tidak langsung hal ini juga dapat berdampak membawa mewujudkan pengelolaan administrasi desa yang transparan dan bertanggung jawab. Pencatatan administrasi yang baik bisa digunakan untuk menggal

potensi wilayah ini dengan baik. Oleh karena itu, aplikasi surat-menyurat secara komputerisasi akan memudahkan kantor instansi pemerintah yakni kantor desa dalam pembuatan surat lebih cepat dan akurat sesuai data yang dimiliki setiap penduduk yang tinggal di dalamnya.

Kemudahan urusan surat menyurat di era kecanggihan teknologi ini direalisasikan dalam bentuk aplikasi manajemen surat yang sudah ada di dalam fitur aplikasi PAHARI. Aplikasi ini merupakan hasil dari pemecahan masalah persuratan yang ada pada perkantoran. Dalam penerapannya tentunya menjadi aplikasi pengembangan teknologi yang dapat digunakan dalam segala aspek persuratan. Surat-menyurat yang menggunakan sistem manual pada perkantoran selalu melibatkan staf atau admin khusus dalam mengatasi masalah tersebut. Admin tentunya berasal dari sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, yang mampu menyelesaikan tugasnya. Admin atau tenaga khusus yang melakukan atau menyelesaikan urusan persuratan menggunakan sistem manual dan konvensional memerlukan waktu cukup lama. Penginputan yang dilakukan haruslah sesuai dengan korelasi atau hubungan antara surat masuk dan keluar. Oleh karena itu, penginputan dan pemrosesan surat haruslah menggunakan aplikasi dalam penerapannya.

Kehadiran Aplikasi PAHARI menjadi solusi inovatif yang dapat menyelesaikan permasalahan terutama dalam pencatatan administrasi yang lebih baik dan rapi. Adapun manfaat yang didapat dari penggunaan atau penerapan aplikasi PAHARI dalam bidang pencatatan yaitu:

a. Penyelesaian surat akan terselesaikan dengan cepat dan akurat.

Aplikasi PAHARI mampu mengatasi masalah mengenai data surat menyurat dan monitoring surat menjadi lebih cepat dan efisien karena proses surat

akan dilakukan hanya dengan aplikasi dan secara modern.

b. Menghemat tempat, waktu, dan biaya.

Dengan penggunaan aplikasi PAHARI akan menghemat tempat karena pengarsipan dan pencatatan hanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan surat yang ada tidak perlu diarsipkan atau diletakkan di tempat khusus.

c. Mudah dalam pengoperasiannya.

Aplikasi pengembangan teknologi ini sangat mudah dalam pengoperasiannya, karena dapat diakses dan digunakan kapan saja.

d. Tidak lagi berketergantungan terhadap kemampuan komputer tenaga administrasi tertentu.

Semua tenaga perangkat desa diberikan bimbingan teknis sehingga semuanya memiliki kemampuan komputer dalam membuat surat-menyurat yang seragam. Apalagi jika tenaga kerja yang terikat berhalangan hadir. Ini membuat pelayanan administratif desa tidak lagi bergantung terhadap tenaga kerja administratif tertentu dan akan berdampak baik dalam hal membangun sistem pelayanan pemerintah desa di Kabupaten Pulang Pisau.

Hal ini berhubungan dengan mudahnya dalam pengopersikan aplikasi pelayanan publik. Aplikasi PAHARI yang berbasis pengembangan teknologi ini sangat mudah dalam pengoperasiannya, karena dapat diakses dan digunakan kapan saja. Aplikasi pengembangan teknologi dengan bentuk aplikasi surat menyurat ini adalah salah satu bentuk dari dampak perkembangan teknologi yang diaplikasikan dalam membantu urusan pemerintah desa. Dalam penerapannya akan mudah dilakukan, karena dapat diakses hanya dengan aplikasi yang dapat digunakan untuk monitoring surat. Dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi PAHARI akan membantu dan

meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah desa serta dapat menyesuaikan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah persuratan.

KESIMPULAN

Pelayanan berbasis Aplikasi PAHARI Di Kabupaten Pulang Pisau dapat meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. Terlihat dari efektifitas pemanfaatan yang menghasilkan proses pelayanan yang lebih cepat, pelayanan administrasi berbasis sistem aplikasi dalam komputerisasi, penyajian format administrasi yang standar serta berdampak kepada pencatatan administrasi yang menjadi lebih baik dan rapi.

REFERENSI

- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung. PT, Remaja Rosdakarya.
- Agustin, M. (2015) Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Jom Fisip Volume 2 No. 1
- Arfian, Andy, (2019). Pakai Aplikasi Pahari, Layanan Kependudukan Kian Mudah.
- Chabib Soleh dan Suripto, 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media
- Edy Sutrisno. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana
- Eko, Widodo Suparno, 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Garvera, R. R. (2018) Kinerja Aparat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis (Studi Tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
- Hardiyansyah, 2018. Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gava Media, hlm.15
- Hendry, Simamora. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN h. 327
- Indrawati, W., Suntoro, I., & Nurmalisa, Y. (2017) Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulangin. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung
- Lawler III, Edward E. dan Porter, Lyman W. (1967). 'The Effect of Performance on Job Satisfaction'. Industrial Relations, a Journal of Economy and Society. Vol. 7, no.1.
- Miner, John. B. 1990. Organizational Behavior: Performance and Productivity. New York: Random House
- Muhammad, Noh. 2015. Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Desa Dan Pelayanan Masyarakat Di Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Journal Pemerintahan Integratif, 2015.
- Mukarom dkk, 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia Mukarom, dkk 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Mu'min, "Kualitas Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Palu ", Nusa Media, 2013, hlm 145
- Purbohandowo, M. (2017) Strategi Penempatan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi Edisi ke 7 (Jilid II). Jakarta: Prehallindo
- Sibarani, Y., Imrona, M., Setiawan, E. D., & Dzuhri, F. A. (2015) Aplikasi Pelayanan Administrasi Penduduk Desa Berbasis Web Programing. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (Snati)
- Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup